



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DALAM  
MENJAMIN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI KOTA  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

**Puput Kusuma Dewi**

**221003742019014**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DALAM MENJAMIN HAK-  
HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
PUPUT KUSUMA DEWI  
NPM : 221003742019014

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

MONICA BELINDA OKSAVINA, SH., MKn.  
NUPTK : 1245772673230213

Anggota,

EMA NURHAYATI, SH., M.HAN.  
NUPTK : 3347774675230193

Anggota,

DR. AGUS WIBOWO, SH, MSI  
NUPTK : 0145740641130073

Mengetahui  
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

<b>FAKULTAS HUKUM.....</b>	<b>i</b>
<b>FAKULTAS HUKUM.....</b>	<b>ii</b>
<b>FAKULTAS HUKUM.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	12
C. Perumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Landasan Teori .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	23

D. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Spesifikasi Penelitian .....	37
C. Sumber Data .....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
E. Metode Penyajian Data .....	40
F. Metode Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang .....	42
B. Efektivitas penerapan hukum perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian di Kota Semarang .....	50
C. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum perkawinan dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK

Efektivitas penerapan hukum perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian di Kota Semarang. Meskipun Undang-Undang telah mengatur perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana efektivitas penerapan hukum perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian di Kota Semarang? (2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum perkawinan dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa (1) penerapan hukum perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian di Kota Semarang belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan data Pengadilan Agama Semarang, terdapat peningkatan signifikan kasus perceraian, dengan mayoritas berupa cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Meskipun secara substansi hukum telah diatur dengan jelas dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan terkait, implementasinya menghadapi hambatan. (2) berdasarkan data yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian di Kota Semarang adalah dengan pembaruan regulasi dan di bentuknya lembaga khusus yang melaksanakan putusan pengadilan, serta edukasi terhadap perempuan tentang pengajuan hak-hak terhadap perempuan dalam kasus perceraian.

**Kata Kunci** : Efektivitas Hukum; Hukum Perkawinan; Hak-Hak Perempuan, Perceraian

### ***ABSTRACT***

The effectiveness of the implementation of marriage laws in guaranteeing women's rights after divorce in Semarang City. Although the law regulates the protection of women's rights after divorce, its implementation in the field still faces various obstacles. The issues discussed in this study are (1) How effective is the implementation of marriage law in guaranteeing women's rights after divorce in Semarang City? (2) What efforts can be made to improve the effectiveness of the implementation of marriage law in protecting women's rights after divorce? This study uses an empirical juridical research method with a qualitative approach. The data sources used consist of secondary data as the main data and primary data as supporting data, with data collection methods through document studies and interviews. Data analysis uses qualitative analysis. The results of the study show that (1) the implementation of marriage law in guaranteeing women's rights after divorce in Semarang City is not yet fully effective. Based on data from the Semarang Religious Court, there has been a significant increase in divorce cases, with the majority being divorce suits filed by wives. Although the substance of the law is clearly regulated in the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and related regulations, its implementation faces obstacles. (2) Based on the data, what needs to be improved to increase effectiveness in protecting women's rights after divorce in Semarang City is the updating of regulations and the formation of a special institution to carry out court decisions, as well as education for women on how to claim their rights in divorce cases.

***Keywords:*** *Legal Effectiveness; Marriage Law; Women's Rights; Divorce*